

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2016



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2015**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun perencanaan lima tahunan berupa Rencana Strategis (Renstra) dan setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT mencantumkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015 merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 – 2019, yang memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

Diharapkan dengan disusunnya RKT 2016, dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Jakarta, Maret 2015

Direktur Jenderal,



Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA
NIP. 19590530 198403 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Sasaran.....	2
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	3
A Visi dan Misi.....	3
B Tujuan dan Sasaran.....	3
C Strategi.....	4
D Kebijakan.....	4
BAB III PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	8
A. Program dan Kegiatan.....	8
B. Pelaksanaan Kegiatan.....	10
BAB IV PENUTUP.....	12
LAMPIRAN.....	13

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran-1. RKT dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.....	13
Lampiran-2. Target Populasi Ternak Tahun 2016.....	15
Lampiran-3. Target Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2016.....	16
Lampiran-4. Lokasi Pengembangan Kawasan Komoditas Ternak.....	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan peternakan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik dari lingkungan dalam negeri maupun dari lingkungan global. Dinamika lingkungan dalam negeri berkaitan dengan dinamika permintaan produk peternakan, penyediaan bibit ternak, kualitas bibit, terjadinya berbagai wabah penyakit ternak yang sangat merugikan, serta tuntutan perubahan manajemen pembangunan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan partisipasi masyarakat. Sedangkan isu global yang sedang dihadapi adalah perubahan iklim global, krisis pangan, energi dunia dan harga pangan.

Dari sisi pembangunan ekonomi nasional, bukti empiris menunjukkan bahwa sub sektor peternakan memiliki peran cukup strategis utamanya dari kontribusi terhadap produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, penyedia bahan pangan, bahan energi, pakan dan bahan baku industri, serta sumber pendapatan di pedesaan. Namun besarnya peran tersebut, ternyata belum dinikmati oleh para pelaku usaha peternakan utamanya masyarakat peternak sendiri.

Pada era reformasi dan otonomi daerah, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah berupaya, mengimplementasi program dan kegiatan dilapangan guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan rencana, layanan berkualitas dan pemanfaatan sumber daya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal. Sehingga, untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasinya diperlukan sumberdaya manusia, sarana/peralatan dan pendanaan yang memadai serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016 dalam kerangka pencapaian kinerja program tahun 2015 - 2019, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab atas satu program dari 12 program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian yaitu **“Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.”** Pencapaian program tersebut akan ditempuh melalui 6 kegiatan utama yaitu (i) peningkatan produksi bibit ternak; (ii) peningkatan produksi ternak; (iii) peningkatan produksi pakan ternak; (iv) pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ); (v) Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan; dan (vi) peningkatan dukungan manajemen dan teknis lainnya bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk acuan pencapaian kinerja program dan kegiatan pada tahun 2016, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan 2016 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan untuk memandu penyusunan rencana kegiatan tahun 2016 yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2016 adalah :

- a. Memberikan gambaran rencana prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.
- b. Menyusun indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2016.
- c. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2016

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2016 adalah sebagai berikut :

1. Terjabarkannya program ke dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat pengungkit pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
2. Tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama satu tahun.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Kementerian Pertanian Tahun 2015 adalah:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
5. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2016

A. Visi dan Misi

Visi yang tertuang dalam Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah: " *Terwujudnya kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak*".

Visi ini telah mempertimbangkan keselarasan dengan **Visi Presiden yang tertuang di dalam Nawa Cita** yaitu *Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian* dan **Visi Kementerian Pertanian** yaitu *Terwujudnya Sistem Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat Dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Kedaulatan Pangan Untuk Kesejahteraan Petani*.

Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan (asal ternak) yang menjamin hak atas pangan (asal ternak) bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kedaulatan/ kemandirian pangan asal ternak
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak.
3. Mengembangkan peternakan dan kesehatan hewan berbasis bioindustri berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan

B. Tujuan dan Sasaran Tahun 2015-2019

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan, adalah:

1. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak .
2. Meningkatkan kualitas komoditas ternak
3. Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor
4. Meningkatkan status kesehatan hewan.
5. Mengembangkan usaha peternakan yang terintegrasi
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak

sedangkan sasaran pembangunan peternakan dan keswan, yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya produksi pangan asal ternak
2. Meningkatnya daya saing peternakan
3. Meningkatnya kesejahteraan peternak

C. Strategi

Strategi yang akan diterapkan dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah:

1. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal
2. Penguatan kawasan dan kelembagaan peternakan
3. Penguatan infrastruktur dan pelayanan teknis
4. Pemberdayaan Peternakan dan Daya Saing
5. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas (kualitas) SDM peternakan dan kesehatan hewan
6. Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. Penguatan Regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan
8. Mendorong insentif peternakan
9. Perbaikan Tata Niaga Ternak dan Produk Ternak

D. Kebijakan

1. Kebijakan Umum

Arah kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2015-2019 adalah untuk : (i) menjamin produksi benih dan bibit ternak; (ii) meningkatkan populasi dan produktifitas ternak; (iii) meningkatkan produksi pakan ternak; (iv) meningkatkan status kesehatan hewan; (v) menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing; (vi) meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Kebijakan Teknis

➤ Peningkatan Produksi Ternak

Output:

1. Perbaikan manajemen pemeliharaan ternak

Indikator:

- a. Penurunan Calving Interval (bulan)
- b. Penurunan S/C (rasio)
- c. Jumlah kebuntingan hasil Intensifikasi Kawin Alam (ekor)
- d. Jumlah kebuntingan hasil IB (ekor)
- e. Jumlah kelahiran hasil IB dan Kawin Alam (ekor)
- f. Jumlah kelahiran ternak lainnya (kambing, domba, babi) (ekor)
- g. Jumlah ternak unggas siap potong (ekor berat hidup)

- h. Jumlah telur itik yang dihasilkan (kg)
 - i. Jumlah kelompok yang menerapkan prinsip-prinsip GFP (kelompok)
2. Penguatan Usaha dan Kelembagaan Peternak
- Indikator:
- a. Jumlah kelompok ternak yang berbadan hukum (kelompok)
 - b. Jumlah kelompok yang mampu mengakses sumber pembiayaan (kelompok)
 - c. Berkembangnya kemitraan usaha di bidang budidaya ternak (kemitraan)
- Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Bibit Ternak
- Output:
1. Produksi Benih Ternak
- Indikator:
- a. Jumlah produksi semen beku
 - b. Jumlah produksi embrio ternak (embrio)
2. Produksi Bibit Ternak
- Indikator:
- a. Jumlah produksi bibit ternak ruminansia (ekor)
 - b. Jumlah produksi bibit ternak unggas dan babi (ekor)
3. Penguatan Kelembagaan dan Wilayah Perbibitan Ternak
- Indikator:
- a. Jumlah kelompok perbibitan ternak yang menerapkan prinsip-prinsip pembibitan kelompok
 - b. Jumlah kelembagaan yang menerapkan Good breeding practices (unit)
 - c. Jumlah penetapan wilayah sumber bibit dan penetapan wilayah sumber bibit dan penetapan/pelepasan rumpun/ galur ternak (Kepmentan)
 - d. Jumlah usaha berbadan hukum yang berasal dari kelompok yang melaksanakan pembibitan (unit)
 - e. Jaminan mutu benih dan bibit ternak
- Peningkatan Produksi Pakan
- Output:
1. Produksi HPT berkualitas
- indikator:
- a. Jumlah produksi HPT (Ton/ BK)
 - b. Jumlah bibit/benih HPT (stek)
2. Produksi pakan olahan dan bahan pakan
- Indikator:
- a. Jumlah produksi pakan olahan dan bahan pakan (ton)
 - b. Peningkatan PPBH (kg/ekor/hr)
 - c. Peningkatan produksi susu (liter/ekor/hr)

3. Peningkatan mutu dan keamanan pakan
 - Indikator:
 - a. Penertiban sertifikat pengujian mutu, NPP dan CPPB (buah)

- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis.
 - Output:
 1. Peningkatan status kesehatan hewan
 - Indikator:
 - a. Jumlah wilayah kejadian penyakit berbasis surveilans (wilayah)
 - b. Jumlah wilayah pencegahan dan pemberantasan PHMS (wilayah)
 - c. Jumlah wilayah penanganan gangguan reproduksi (wilayah)
 - d. Jumlah pembebasan wilayah PHMS (wilayah)
 - e. Jumlah wilayah bebas PHMS (wilayah)
 2. Jumlah sertifikat
 - indikator:
 1. CPOHB
 2. Nomor pendaftaran obat hewan
 3. Kompartemen bebas AI
 3. Peningkatan produksi vaksin dan bahan biologik serta obat hewan
 - Indikator:
 1. Jumlah produksi vaksin, bahan biologik dan obat hewan
 4. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan
 - Indikator:
 1. Jumlah unit pelayanan kesehatan hewan
 5. Penguatan sistem informasi kesehatan hewan nasional
 - Indikator:
 1. Jumlah kabupaten/kota yang telah menerapkan Isikhnas

- Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing
 - Output:
 1. Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak
 - a. Jumlah pengujian produk pangan asal ternak (sampel)
 - b. Jumlah NKV (unit usaha)
 - c. Jumlah Sertifikat Pangan Asal Ternak (buah)
 2. Penerapan Pencegahan Zoonosis
 - a. Jumlah unit usaha yang menerapkan prinsip pencegahan zoonosis (unit usaha)
 3. Penerapan Kesrawan
 - a. Jumlah unit usaha yang memenuhi standar kesrawan (unit usaha)
 4. Jaminan Keamanan Produk Hewan Prospektif
 - a. Jumlah sertifikat/ surat keterangan produk hewan prospektif

- Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Output:
 1. Implementasi SAKIP
Indikator:
 - a. Penilaian SAKIP
 - b. Opini laporan keuangan BPK terhadap kinerja pembangunan
 2. Sistem Informasi
Indikator:
 - a. Sistem informasi yang terpelihara
 - b. Jumlah sistem informasi yang dibangun
 3. IPNBK dan IKM
Indikator:
 - a. Indeks penerapan nilai budaya kerja: 3,33
 - b. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
 - c. Evaluasi SKP ditetapkan
 4. NSPK dan Regulasi
Indikator:
 - a. Jumlah NSPK yang diterbitkan
 - b. Jumlah regulasi yang diterbitkan
 5. Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Indikator:
 - a. Jumlah dokumen data dan informasi yang diterbitkan
 - b. Nilai pelayanan informasi publik

BAB III PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan

1. Program

Program utama dari Ditjen PKH adalah “Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat” . Program ini menjadi rujukan strategi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat aksi atau operasional.

Program berisi satu atau beberapa kegiatan, yang dilaksanakan oleh satuan di bawah unit kerja Eselon I dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan strategi yang telah dirumuskan dan program utama Ditjen PKH.

Sasaran berupa outcome yang diharapkan dari program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah (i) terpenuhinya pangan asal ternak; (ii); meningkatnya kesejahteraan peternak; dan (iii) meningkatnya daya saing peternakan. Outcome tersebut akan dicapai melalui 6 (enam) kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu:

- a. Kegiatan peningkatan produksi benih dan bibit ternak
Sasaran: Tercapainya peningkatan produksi benih dan bibit ternak
- b. Kegiatan peningkatan produksi ternak :
Sasaran: Tercapainya peningkatan kelahiran dan produksi ternak
- c. Kegiatan peningkatan produksi pakan ternak
Sasaran: Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak
- d. Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit *zoonosis*.
Sasaran: meningkatnya status kesehatan hewan.
- e. Kegiatan penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan.
Sasaran: Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan.
- f. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan.
Sasaran: Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis.

2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja setingkat Eselon II sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dan terdiri dari sekumpulan aktivitas pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

Masukan (*input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau agar menghasilkan keluaran (*output*). Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan. Sedangkan hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang merefleksikan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan yang mencerminkan fungsi Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi bibit ternak
Aktivitas utamanya adalah :
 - 1) Meningkatkan produksi benih ternak (dosis)
 - 2) Meningkatkan produksi bibit ternak (ekor)
 - 3) Memperkuat kelembagaan perbibitan ternak (kelompok)
 - 4) Memperkuat wilayah perbibitan
- b. Meningkatkan produksi ternak
Aktivitas utamanya adalah:
 - 1) Mengembangkan budidaya sapi potong, sapi perah dan kerbau yang menerapkan Good Farming Practices (GFP) (kelompok)
 - 2) Mengembangkan ruminansia kecil menerapkan Good Farming Practices (GFP) (kelompok)
 - 3) Mengembangkan budidaya ternak unggas dan aneka ternak menerapkan Good Farming Practices (GFP) (kelompok)
 - 4) Memperkuat kelembagaan peternak (kegiatan)
 - 5) Optimalisasi IB dan gertak berahi (akseptor)
- c. Meningkatkan produksi pakan ternak
Aktivitas utamanya adalah:
 - 1) Mengembangkan HPT (stek)
 - 2) Mengembangkan pakan olahan/bahan pakan (ton)
 - 3) Mengembangkan mutu dan keamanan pakan (sampel)
- d. Meningkatkan penanganan PHMSZ
Aktivitas utamanya adalah:
 - 1) Melaksanakan Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan PHMSZ (dosis)
 - 2) Melaksanakan Penyidikan dan pengujian penyakit hewan dan sertifikasi obat hewan (sampel)
 - 3) Memperkuat kelembagaan otovet (unit)
 - 4) Memproduksi vaksin dan bahan biologis (dosis)
 - 5) Memperkuat Siskeswanas (provinsi)
- e. Peningkatan jaminan pangan yang ASUH
Aktivitas utamanya adalah:
 - 1) Menerapkan penjaminan produk hewan yang ASUH (unit)
 - 2) Mencegah penularan zoonosis (unit)

- 3) Melaksanakan penerapan Kesrawan (unit)
 - 4) Melaksanakan pemenuhan pesyaratan teknis produk hewan prospektif (unit usaha)
- f. Peningkatan dukungan manajemen teknis dan kesekretariatan
Aktivitas utamanya adalah:
- 1) Melaksanakan penerapan SAKIP (Dokumen)
 - 2) Melaksanakan dukungan kesekretariatan lainnya

Rencana kinerja tahunan dan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2016, disajikan pada Lampiran-1

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Fasilitasi Kegiatan Umum

- a. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan program pembangunan peternakan dan keswan Tahun 2016, fasilitasi kegiatan pembangunan peternakan diarahkan pada : pemenuhan pelayanan teknis minimal kesehatan hewan dan perbibitan serta peningkatan usaha produktif bidang peternakan dan keswan
- b. Lokasi fasilitasi kegiatan teknis minimal perbibitan dan kesehatan hewan dilaksanakan diseluruh Indonesia
- c. Pembangunan komoditas peternakan difokuskan pada 8 komoditas strategis dan unggulan yaitu : sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing/domba, itik, ayam lokal, dan babi
- d. Fasilitasi kegiatan dan komoditas diarahkan pada lokasi kawasan komoditas peternakan yang sudah ditetapkan (30 % dari total anggaran). Lokasi kawasan pengembangan komoditas mencakup : 144 kab/kota di 22 Propinsi pada 71 kawasan (lokasi kawasan terlampir)

2. Pelaksanaan Kegiatan Teknis

a. produksi ternak.

Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya kelahiran ternak dan peningkatan produktifitas daging, telur dan susu. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis, ditempuh melalui penguatan/pemberdayaan kelompok, penguatan sarana dan prasarana, pengawalan dan pendampingan, bimbingan teknis dan penguatan kelembagaan. Kegiatan ini difasilitasi melalui dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Konsentrasi.

b. Pelaksanaan kegiatan pakan ternak.

Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya ketersediaan pakan ternak (hijauan dan olahan). Fasilitasi kegiatan ini berupa penguatan dan pemberdayaan kelompok, penguatan sarana dan prasarana pakan, pengawasan dan pengujian mutu pakan, bimtek, penguatan kelembagaan. Kegiatan ini difasilitasi melalui dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Konsentrasi dan Kantor Daerah.

c. Pelaksanaan kegiatan perbibitan ternak

Sasaran strategis kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan produksi benih dan bibit ternak. Fasilitasi kegiatan ini berupa penguatan dan pemberdayaan kelompok, penguatan sarana dan prasarana pakan, produksi bibit dan benih, pengawasan dan pengujian mutu bibit, bimtek, penguatan kelembagaan, pelayanan teknis minimal perbibitan. Kegiatan ini difasilitasi melalui dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Konsentrasi dan Kantor Daerah (BBIB, BIB, BBPTU, BPTU)

d. Pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan

Sasaran strategis kegiatan ini adalah terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis. Fasilitasi kegiatan ini berupa penguatan sarana dan prasarana kesehatan hewan, produksi vaksin bahan biologik dan obat hewan, pengujian dan sertifikasi obat hewan, penyidikan dan pengujian penyakit, penanganan dan pengendalian penyakit hewan, bimtek, penguatan kelembagaan, pelayanan teknis minimal keswan. Kegiatan ini difasilitasi melalui dana Dekonsentrasi, Konsentrasi dan Kantor Daerah (BBVet, Bvet, Pusvetma, BBPMSOH)

e. Pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner

Sasaran strategis kegiatan ini adalah terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. Fasilitasi kegiatan ini berupa penguatan sarana dan prasarana kesmavet dan pascapanen, pengujian dan pengawasan mutu produk, bimtek, penguatan kelembagaan, penerapan kesrawan. Kegiatan ini difasilitasi melalui dana Dekonsentrasi, Konsentrasi dan Kantor Daerah (BBVet, Bvet, BPMP SH)

f. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan

Sasaran strategis kegiatan ini adalah terlaksananya SAKIP dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan program. Fasilitasi kegiatan ini berupa penguatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas dukungan input (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja). Kegiatan ini difasilitasi melalui dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Konsentrasi dan Kantor Daerah

BAB IV. P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai sasaran program yang ditetapkan. RKT merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka mewujudkan visi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan “Terwujudnya kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak”, program yang dilaksanakan adalah “pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat” dan sasarannya adalah (1) meningkatnya produksi pangan asal ternak, (2) meningkatnya daya saing peternakan dan (3) meningkatnya kesejahteraan peternak.

Pencapaian sasaran tahun 2016 mengacu pada penerapan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) sehingga aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan yang ada mengarah pada output fungsi.

Lampiran-1. Rencana Kinerja Tahunan Dan Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan Pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET TAHUN 2016	ANGGARAN TAHUN 2016 (Rp. Milyar)
1	Program Pemenuhan Pangan Hewani Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1. Meningkatnya pangan hewani asal ternak	1	Produksi Daging Sapi/Kerbau (ribu ton)	545,29	3.540,49
			2	Produksi Daging ternak lainnya (ribu ton)	3.438,01	
			3	Produksi Tekur (ribu ton)	3.131,89	
			4	Produksi Susu (ribu ton)	799,97	
		2. Meningkatnya daya saing peternakan	1	Peningkatan status kesehatan hewan (%)	73	
			2	Jumlah sertifikat (buah)	26.000	
		3. Meningkatnya kesejahteraan peternak		Nilai Tukar Peternak (Rp)	106,94	
2	Peningkatan Produksi Ternak	Meningkatnya manajemen pemeliharaan ternak mendukung peningkatan populasi dan produksi ternak	1	Pengembangan Budidaya Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau (kelompok)	1.106	1.310,30
			2	Pengembangan ternak perahl (Kelompok)	122	
			3	Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka Ternak (Kelompok)	310	
			4	Penguatan usaha dan Kelembagaan Peternak (Kegiatan)	50	
			5	Optimalisasi IB dan Sinkronisasi Berahi (Akseptor)	2.000.000	
3	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Meningkatnya ketersediaan pakan ternak	1	Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (stek)	4.000.000	746,13
			2	Pengembangan Pakan Olahan/ Bahan Pakan (ton)	14.405	
			3	Pengembangan Mutu dan Keamanan Pakan (sampel)	7.600	
4	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	1	Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ), Viral, Bakterial, parasit dan gangguan reproduksi (dosis)	4.741.588	420,45
			2	Pengujian Penyakit Hewan dan sertifikasi obat hewan (sampel)	157.600	
			3	Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner (wilayah)	34	
			4	Produksi vaksin dan bahan biologik (dosis)	8.461.553	
			5	Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS)/ wilayah	34	
5	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit	Meningkatnya kualitas dan kuantitas benih dan Bibit	1	Peningkatan Produksi Benih Ternak (Dosis)	5.045.800	555,00
			2	Peningkatan Produksi Bibit Ternak (Ekor)	537.209	
			3	Penguatan Kelembagaan dan Wilayah Perbibitan Ternak (Sertifikat/SKLB)	3.943.868	
			4	Peningkatan Produksi Benih Ternak (Dosis)	5.045.800	

6	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing	Meningaktanya produksi hewan yang ASUH dan Berdaya Saing	1	Penjaminan Produk hewan yang ASUH (unit)	120	180,00
			2	Pencegahan penularan zoonosis (unit)	30	
			3	Penerapan Kesejahteraan Hewan (unit)	40	
			4	Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk Hewan Prospektif (unit)	20	
7	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Penerapan SAKIP (dokumen)	1	Penerapan SAKIP (dokumen)	656	316,30
			2	Kegiatan kesekretariatan lainnya (bulan)	12	

Lampiran-2. Target Populasi Ternak Tahun 2016

(000 ekor)

No	Jenis Ternak	Tahun 2016
1	Sapi Potong	13.597
2	Sapi Perah	472
3	Kerbau	1.127
4	Kambing	20.707
5	Domba	18.160
6	Babi	8.156
7	Ayam Buras	277.523
8	Ayam Petelur	207.557
9	Ayam Pedaging	2.707.783
10	Itik	47.364

Lampiran-3. Target Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2016

No	Jenis Ternak	Tahun 2016
A	Daging	4.267,23
1	Sapi (karkas)	552,20
	Sapi (daging)	441,76
2	Kerbau (karkas)	36,36
	Kerbau (daging)	29,09
3	Kambing	66,71
4	Domba	50,26
5	Babi	354,76
6	Ayam Buras	330,67
7	Ayam Petelur	108,65
8	Ayam Pedaging	2.728,09
9	Itik	39,53
B	Telur	3.393,36
1	Ayam Buras	204,82
2	Ayam Petelur	2.892,81
3	Itik	295,73
C	Susu	850,77

Lampiran-4. Lokasi Pengembangan Kawasan Komoditas Ternak

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS
1	ACEH	1 ACEH 1	1 Kab. Aceh Jaya	Sapi Potong
			2 Kab. Bener Meriah	
			3 Kab. Aceh Besar	
		2 ACEH 2	4 Kab. Aceh Tamiang	Sapi Potong
2	SUMATERA UTARA	3 SUMUT 1	5 Kab. Langkat	Sapi Potong
			6 Kab. Deliserdang	
		4 SUMUT 2	7 Kab. Samosir	Kerbau
			8 Kab. Padang Lawas	
		5 SUMUT 3	9 Kab. Simalungun	Kambing
			10 Kab. Asahan	
		6 SUMUT 4	11 Kab. Tapanuli Utara	Babi
			12 Kab. Humbang Hasundutan	
3	SUMATERA BARAT	7 SUMBAR 1	13 Kab. Pasaman Barat	Sapi Potong
			14 Kab. Limapuluhkota	
			15 Kab. Agam	
		8 SUMBAR 2	16 Kab. Pesisir Selatan	Kerbau
			17 Kab. Sijunjung	
4	RIAU	9 RIAU 1	18 Kab. Rokan Hilir	Sapi Potong
			19 Kab. Rokan Hulu	
			20 Kab. Kampar	
		10 RIAU 2	21 Kab. Indragili Hulu	Sapi Potong
			22 Kab. Kuantan Singingi	
			23 Kab. Pelalawan	
			24 Kab. Siak	
				11 RIAU 3
		12 RIAU 4	26 Kep. Indragiri Hilir	Sapi Potong
5	JAMBI	13 JAMBI 1	27 Kab. Sarolangun	Sapi Potong
			28 Kab. Bungo	

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS
6	SUMATERA SELATAN	14 SUMSEL 1	29 Kab. OKI	Kerbau
7	BENGKULU	15 BENGKULU 2	30 Kab. Kepahiyang	Kambing
8	LAMPUNG	16 LAMPUNG 1	31 Kab. Lampung	Sapi Potong
			32 Kab. Lampung Timur	
			33 Kota Bandar Lampung	
			34 Kab. Lampung	
9	JAWA BARAT	17 CIAYUMAJAKUNING	35 Kab. Cirebon	Sapi Potong
			36 Kota Cirebon	
			37 Kab. Indramayu	
			38 Kab. Kuningan	
			39 Kab. Majalengka	
		18 PURWASUKA	40 Kab. Subang	Sapi Potong
		19 CEKUNGAN BANDUNG	41 Kab. Bandung Barat	Sapi Perah
			42 Kab. Bandung	
		20 PRIANGAN TIMUR	43 Kab. Garut	Domba
			44 Kab. Tasikmalaya	
			45 Kab. Ciamis	
10	JAWA TENGAH	21 TENGKEB	46 Kab. Kebumen	Sapi Potong
		22 TENGSEMARTIGA	47 Kab. Semarang	Sapi Perah
			48 Kota Salatiga	
		23 JALITILUT	49 Kab. Grobogan	Sapi Potong
			50 Kab. Blora	
		24 JALIGARA	51 Kab. Klaten	Sapi Potong
			52 Kab. Sragen	
			53 Kab. Sukoharjo	
		25 TENGBREGAL	54 Kab. Brebes	Kerbau
			55 Kab. Tegal	
		26 TENGPURBA	56 Kab. Purworejo	Kambing
			57 Kab. Banyumas	
		27 TENGBANJAR	58 Kab. Banjarnegara	Domba

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS	
11	DI YOGYAKARTA	28 DIY 1	59 Kab. Gunung Kidul	Sapi Potong	
			60 Kab. Sleman		
			61 Kab. Kulonprogo		
			62 Kota Yogyakarta		
12	JAWA TIMUR	29 JATIM 1	63 Kab. Sumenep	Sapi Potong	
			64 Kab. Bangkalan		
			65 Kab. Pamekasan		
		30 JATIM 3	66 Kab. Malang	Sapi Perah	
			67 Kota Batu		
		31 JATIM 4	68 Kab. Lamongan	Sapi Potong	
		32 JATIM 5	69 Kab. Tuban	Sapi Potong	
		33 JATIM 6	70 Kab. Lumajang	Kambing	
		34 JATIM 7	71 Kab. Bondowoso	Domba	
		35 JATIM 8	72 Kab. Trenggalek	Kambing	
36 JATIM 9	73 Kab. Jombang	Kambing			
13	BANTEN	37 BANTEN 1	74 Kab. Tangerang	Sapi Potong	
			75 Kab. Lebak		
		38 BANTEN 2	76 Kab. Pandeglang	Kerbau	
			39 BANTEN 3		77 Kab. Serang
					78 Kota Serang
14	BALI	40 TAJEM	79 Kab. Tabanan	Kambing	
			80 Kab. Jembrana		
		41 BABAGI	81 Kab. Badung	Babi	
			82 Kota Denpasar		
			83 Kab Gianyar		
			84 Kab Bangli		
		42 BUKAK	85 Kab. Klungkung	Sapi Potong	
			86 Kab. Karangasem		
			87 Kab. Buleleng		
		15	NUSA TENGGARA BARAT	43 NTB 1	88 Kota Bima
89 Kab. Sumbawa					
90 Kab. Dompu					
91 Kab. Sumbawa Barat					
44 NTB 2	92 Kab. Lombok Tengah			Sapi Potong	
93 Kab. Lombok Timur					

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS
11	DI YOGYAKARTA	28 DIY 1	59 Kab. Gunung Kidul	Sapi Potong
			60 Kab. Sleman	
			61 Kab. Kulonprogo	
			62 Kota Yogyakarta	
12	JAWA TIMUR	29 JATIM 1	63 Kab. Sumenep	Sapi Potong
			64 Kab. Bangkalan	
			65 Kab. Pamekasan	
		30 JATIM 3	66 Kab. Malang	Sapi Perah
			67 Kota Batu	
		31 JATIM 4	68 Kab. Lamongan	Sapi Potong
32 JATIM 5	69 Kab. Tuban	Sapi Potong		
33 JATIM 6	70 Kab. Lumajang	Kambing		
16	NUSA TENGGARA TIMUR	45 TIMOR	94 Kab. Kupang	Sapi Potong
			95 Kota Kupang	
			96 Kab. TTS	
			97 Kab. TTU	
			98 Kab. Belu	
		99 Kab. Malaka		
		46 FLORES BAGIAN B	100 Kab. Ngada	Sapi Potong
			101 Kab. Nagekeo	
			102 Kab. Manggarai Timur	
		47 SUMBA	103 Kab. Sumba Timur	Sapi Potong
104 Kab. Sumba Tengah				
105 Kab. Sumba Barat				
106 Kab. Sumba Barat Daya				
17	KALIMANTAN SELATAN	48 KALSEL 1	107 Kab. Hulu Sungai Tengah	Sapi Potong
			108 Kab. Banjar	
			109 Kab. Tanah Laut	
		49 KALSEL 2	110 Kab. Kotabaru	Sapi potong
			111 Kab. Barito Kuala	
		50 KALSEL 4	112 Kab. Hulu Sungai Utara	Kerbau
113 Kab. Hulu Sungai Selatan				
18	KALIMANTAN TIMUR	51 BERSAMA NEGARA SALAM	114 Kab. Paser	Sapi potong
			115 Kab. Kutai Kartanegara	
		52 BULKU BERAU	116 Kab. Kutai Timur	Sapi potong
			117 Kab. Berau	
19	SULAWESI TENGAH	53 SULTENG 2	118 Kab. Sigi	Sapi potong
			119 Kab. Donggala	
20	SULAWESI SELATAN	54 SULSEL 1	120 Kab. Bantaeng	Sapi potong
			121 Kab. Bulukumba	
			122 Kab. Gowa	
			123 Kab. Maros	
		55 SULSEL 2	124 Kab. Barru	Sapi Potong
			125 Kab. Bone	

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS	
11	DI YOGYAKARTA	28 DIY 1	59 Kab. Gunung Kidul	Sapi Potong	
			60 Kab. Sleman		
			61 Kab. Kulonprogo		
			62 Kota Yogyakarta		
12	JAWA TIMUR	29 JATIM 1	63 Kab. Sumenep	Sapi Potong	
			64 Kab. Bangkalan		
			65 Kab. Pamekasan		
		30 JATIM 3	66 Kab. Malang	Sapi Perah	
			67 Kota Batu		
31 JATIM 4	68 Kab. Lamongan	Sapi Potong			
32 JATIM 5	69 Kab. Tuban	Sapi Potong			
33 JATIM 6	70 Kab. Lumajang	Kambing			
16	NUSA TENGGARA TIMUR	45 TIMOR	94 Kab. Kupang	Sapi Potong	
			95 Kota Kupang		
			96 Kab. TTS		
			97 Kab. TTU		
			98 Kab. Belu		
			99 Kab. Malaka		
46	FLORES BAGIAN B	100 Kab. Ngada	Sapi Potong		
				101 Kab. Nagekeo	
				102 Kab. Manggarai Timur	
21	SULAWESI TENGGARA	56 SULTRA 1	126 Kab. Bombana	Sapi Potong	
			57 SULTRA 2		Kab. Konawe Selatan
			58 SULTRA 3		128 Kab. Muna
22	SULAWESI BARAT	59 SULBAR 1	129 Kab. Mamuju	Sapi Potong	
23	MALUKU	60 GUGUS PULAU MALUKU BARAT DAYA	130 Kab. Maluku Barat Daya	Kambing Lakor	
24	PAPUA	61 PAPUA 1	131 Kab. Merauke	Sapi Potong	
			62 PAPUA 2		132 Kab. Jayapura
			133 Kab. Keerom		
		63 PAPUA 4	134 Kab. Nabire	Sapi Potong	
		64 PAPUA 5	135 Kab. Jayawijaya	Babi	
	136 Kab. Yahukimo				
	137 Kab. Lani Jaya				
25	PAPUA BARAT	65 SALAWATI	138 Kab. Sorong	Sapi Potong	
		66 KEBAR	139 Kab. Tamberaw	Sapi Potong	
		67 MOMI WAREN	140 Kab. Manokwari Selatan	Sapi Potong	
		68 BOMBERAY	141 Kab. Fakfak	Sapi Potong	
69 MANOKWARI	142 Kab. Manokwari	Sapi Potong			
26	SULAWESI UTARA	70 SULUT I	143 Kab. Minahasa	Sapi Potong	
27	MALUKU UTARA	71 MALUT 2	144 Kab. Halmahera Utara	Sapi Potong	